

**AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
PPC/CDIE/DI REPORT PROCESSING FORM**

ENTER INFORMATION ONLY IF NOT INCLUDED ON COVER OR TITLE PAGE OF DOCUMENT

1. Project/Subproject Number

497-0357

2. Contract/Grant Number

497-C-00-98-00045-00

3. Publication Date

August 12, 2003

4. Document Title/Translated Title

Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Iklim Usaha di Era Otonomi Daerah (Entrepreneurs' Perception of the Business Climate in the Regional Autonomy Era) (In Indonesian)

5. Author (s)

1. Indra N. Fauzi
- 2.

6. Contributing Organization (s)

Nathan/Checchi Joint Venture/PEG Project

7. Pagination

12

8. Report Number

PEG 132

9. Sponsoring A.I.D. Office

ECG, USAID/Jakarta

10. Abstract (optional - 250 word limit)

Sentralisasi kebijakan pada era orde baru, khususnya dalam pengelolaan potensi ekonomi membuat peran pelaku usaha di daerah terabaikan. Berbagai kebijakan yang disusun lebih banyak bermuatan kepentingan elit-elit pusat, yang justru berdampak negatif bagi iklim usaha di daerah¹. Selain itu sentralisasi juga menimbulkan terjadinya inefisiensi dalam perekonomian, sebagai akibat biaya birokrasi yang sangat tinggi dan tidak transparan. Dan hal tersebut tidak terlepas dari terbatasnya tingkat partisipasi masyarakat proses perumusan kebijakan publik. Orientasi otonomi daerah yang seharusnya lebih menekankan pada pelayanan publik sebagai langkah konkret menjalankan fungsi fasilitator pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ternyata justru makin menambah beban masyarakat. Salah satu indikatornya ditunjukkan dengan banyak bermunculannya perda-perda tentang pajak dan retribusi baru di berbagai daerah yang tujuannya lebih banyak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Situasi ini diperburuk lagi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah yang hingga saat ini juga belum optimal. Oleh karena itu setelah dua tahun pelaksanaan otonomi daerah, maka pertanyaan yang penting untuk diketahui jawabannya dari para pelaku usaha adalah : Bagaimana dampak pelaksanaan otonomi daerah terhadap iklim usaha di daerah ? Apakah iklim usaha menjadi lebih baik, lebih buruk atau masih sama dengan kondisi sebelum otonomi daerah?

11. Subject Keywords (optional)

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Indonesia | 4. Business Climate |
| 2. Decentralization | 5. |
| 3. Regulatory Reform | 6. |

12. Supplementary Notes

13. Submitting Official

C. Stuart Callison, Chief of Party

14. Telephone Number

011-62-21-520-1047

15. Today's Date

October 17, 2003

.....DO NOT write below this line.....

16. DOCID

17. Document Disposition

DOCRD [] INV [] DUPLICATE []



PERSEPSI PELAKU USAHA TERHADAP IKLIM USAHA DI ERA OTONOMI DAERAH

Disampaikan dalam Konferensi PEG-USAID tentang “Desentralisasi, Reformasi Kebijakan dan Iklim Usaha” di Hotel Aryaduta, Jakarta 12 Agustus 2003¹

Oleh :

Indra N. Fauzi

Program Director Regional Economic Development Institute (REDI)

¹ PEG (Partnership for Economic Growth) adalah sebuah proyek dengan dana United States Agency for International Development (USAID). Pandangan-pandangan yang tercantum dalam laporan ini berasal dari pandangan penulis dan tidak semestinya berasal dari USAID, Pemerintah Amerika Serikat ataupun Pemerintah Indonesia.

PERSEPSI PELAKU USAHA TERHADAP IKLIM USAHA DI ERA OTONOMI DAERAH

Pendahuluan

Sentralisasi kebijakan pada era orde baru, khususnya dalam pengelolaan potensi ekonomi membuat peran pelaku usaha di daerah terabaikan. Berbagai kebijakan yang disusun lebih banyak bermuatan kepentingan elit-elit pusat, yang justru berdampak negatif bagi iklim usaha di daerah². Selain itu sentralisasi juga menimbulkan terjadinya inefisiensi dalam perekonomian, sebagai akibat biaya birokrasi yang sangat tinggi dan tidak transparan. Dan hal tersebut tidak terlepas dari terbatasnya tingkat partisipasi masyarakat proses perumusan kebijakan publik.

Seiring dengan reformasi di bidang politik karena derasnya tuntutan masyarakat turut merubah tatanan birokrasi pemerintahan dari sentralistis menjadi desentralisasi. Lahirnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan dasar bagi penerapan sistem desentralisasi. Pemberlakuan kedua UU tersebut memberikan konsekuensi berkurangnya kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat dan semakin besarnya kewenangan pemerintah daerah.

Bagi pemerintah, desentralisasi di satu sisi membuka peluang terciptanya pola pemerintahan yang lebih efisien dan bertanggung jawab. Tetapi, di sisi yang lain, desentralisasi juga menimbulkan masalah, seperti tidak adanya koordinasi dalam penetapan pajak dan retribusi daerah yang bisa berdampak buruk bagi pelaku usaha.

Orientasi otonomi daerah yang seharusnya lebih menekankan pada pelayanan publik sebagai langkah konkret menjalankan fungsi fasilitator pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ternyata justru makin menambah beban masyarakat. Salah satu indikatornya ditunjukkan dengan banyak bermunculannya perda-perda tentang pajak dan retribusi baru di berbagai daerah yang tujuannya lebih banyak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Situasi ini diperburuk lagi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah yang hingga saat ini juga belum optimal.

Oleh karena itu setelah dua tahun pelaksanaan otonomi daerah, maka pertanyaan yang penting untuk diketahui jawabannya dari para pelaku usaha adalah : Bagaimana dampak pelaksanaan otonomi daerah terhadap iklim usaha di daerah ? Apakah iklim usaha menjadi lebih baik, lebih buruk atau masih sama dengan kondisi sebelum otonomi daerah ?

Otonomi Daerah : Belum Memperbaiki Iklim Usaha

Otonomi daerah seharusnya mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi para pelaku usaha. Proses pengambilan keputusan yang lebih pendek seharusnya mampu menciptakan birokrasi yang responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha di daerah. Harapan adanya perbaikan dalam iklim usaha seiring dengan penerapan otonomi daerah ternyata masih perlu dibuktikan.

² Berdasarkan hasil studi REDI (2001), kebijakan tata niaga cengkeh melalui BPPC telah membuat petani cengkeh di Kabupaten Trenggalek dan Pacitan dirugikan. Kebijakan tersebut juga memicu terjadinya proses pemiskinan petani cengkeh. Jumlah penduduk miskin di sentra-sentra produksi cengkeh meningkat sejak adanya tata niaga cengkeh.

Hasil survei REDI dengan PEG-USAID dan TAF pada tahun 2002 terhadap 1.014 pengusaha di 12 propinsi di Indonesia menunjukkan bahwa selama 2 tahun penerapan otonomi daerah ternyata belum memberikan perbaikan yang signifikan pada iklim usaha di daerah. Bahkan di beberapa daerah kondisi iklim usaha cenderung memburuk. Terdapat 3 aspek penting yang menarik dicermati dari hasil survei ini, yaitu :

- Birokrasi perijinan usaha
- Pungutan terhadap pengusaha
- Orientasi dan arah kebijakan pemerintah daerah

Berdasarkan ketiga aspek yang dikaji dalam survei tersebut menunjukkan tidak ada perubahan besar terhadap iklim usaha dalam desentralisasi. Tanggapan umum dari para pelaku usaha adalah bahwa masalah kebijakan pemerintah masih tetap merupakan permasalahan seperti halnya sebelum desentralisasi.

Aspek Birokrasi Perijinan Usaha

Dalam survei yang dilakukan REDI, terdapat lima faktor yang dikaji dari aspek perijinan usaha, yaitu :

- Waktu penyelesaian ijin
- Transparansi biaya
- Total biaya perijinan
- Transparansi prosedur
- Persyaratan yang dibutuhkan

Dari kelima faktor tersebut mulai tampak adanya perbaikan dalam waktu penyelesaian ijin usaha dan sedikit peningkatan dalam transparansi prosedur dan biaya. Namun demikian, perbaikan tersebut menimbulkan konsekuensi pada jumlah biaya perijinan yang lebih tinggi karena pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Dan yang paling memungkinkan salah satunya adalah menjadikan perijinan usaha sebagai salah satu sumber PAD.

Perbaikan dalam hal waktu penyelesaian ijin usaha tampak dari pendapat 30 persen responden yang menyatakan hal tersebut. Meskipun masih ada 54,4 persen responden yang menyatakan belum ada perbaikan, bahkan 7,5 persen responden menyatakan waktu yang diperlukan dalam penyelesaian ijin saat ini lebih lambat dibandingkan sebelum otonomi daerah.

Dalam hal tranparansi biaya pengurusan ijin usaha 58 persen responden menyatakan masih belum transparan. Sedangkan responden yang menyatakan biaya pengurusan ijin usaha saat ini sudah lebih transparan ada 21,7 persen. Di DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara menunjukkan adanya kecenderungan makin memburuknya transparansi biaya perijinan. Kurangnya transparansi biaya dalam pengurusan ijin merupakan salah satu faktor pelaku usaha harus membayar ijin usaha lebih besar dari yang seharusnya.

Sedangkan terkait dengan jumlah biaya dalam pengurusan ijin usaha hanya 12,3 persen responden yang menyatakan jumlahnya lebih sedikit, sedangkan sebagian besar responden yang lain justru menyatakan sebaliknya. Biaya perijinan yang semakin tinggi menunjukkan semakin kuatnya orientasi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Selain itu jumlah

biaya perijinan yang semakin mahal juga disebabkan masih kurangnya transparansi biaya oleh pihak pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan pelaku usaha harus membayar biaya perijinan yang lebih mahal dari ketentuan yang ada. Terdapat lebih dari 28 persen responden yang menyatakan tidak tahu proporsi biaya ijin usaha, baik untuk biaya formal maupun biaya informal.

Prosedur perijinan pun belum bisa dikatakan mengalami perbaikan yang signifikan sejak pelaksanaan otonomi daerah diberlakukan. Masih banyak kita dengar keluhan-keluhan pelaku usaha yang sering terungkap terkait prosedur perijinan yang masih cukup berbelit. Umumnya mereka mengeluh akan rumitnya prosedur yang harus dilalui oleh seorang pelaku bisnis yang sedang mengurus ijin usahanya. Akibat dari rumitnya prosedur perijinan ini, maka biaya yang dikeluarkan pun semakin besar, dan waktu yang diperlukan pun lebih lama.

Persyaratan yang diwajibkan oleh dinas terkait pun sering kali masih sangat berat untuk dipenuhi oleh pelaku usaha, khususnya pelaku usaha yang unit usahanya kecil. Akibat sulitnya pelaku usaha memenuhi persyaratan yang diwajibkan itu, khususnya pelaku usaha kecil, cukup banyak di antara mereka keluar dari sistem. Artinya, mereka sudah tidak mau lagi mengurus ijin usahanya sehingga usahanya berjalan tanpa ijin alias informal. Realitas ini menunjukkan adanya kegagalan fungsi perijinan yang sangat penting bagi pemerintah daerah, terutama untuk fungsi kontrol agar kegiatan usaha di daerah tidak menimbulkan eksternalitas negatif. Faktor persyaratan yang dibutuhkan dalam mengurus ijin usaha di beberapa daerah (seperti : Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara), ternyata saat justru lebih rumit.

Sebenarnya, beberapa kabupaten dan kota mulai menata ulang kebijakan perijinan usaha di daerahnya sejak otonomi daerah di berlakukan. Akan tetapi pada saat yang sama masih cukup banyak pemerintah daerah yang melihat perijinan lebih sebagai sumber PAD. Sebagai contoh, Perda Kota Manado No. 6 Tahun 2001 tentang "Retribusi Daerah di bidang Industri dan Perdagangan" yang mengatur retribusi untuk pelayanan ijin usaha. Tetapi dalam perda tersebut tidak disebutkan standard pelayanan minimum dalam pengurusan ijin, seperti jangka waktu maksimum dalam penyelesaian ijin usaha yang diajukan masyarakat.

Keberadaan perda-perda seperti itu juga terdapat di Kota Mataram (Perda No 3/ 2001). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah masih lebih berorientasi pada upaya menggali potensi PAD dibandingkan memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. Ijin usaha yang seharusnya sebagai alat bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan cenderung malah menjadi '*komoditas komersial*'. Hal tersebut yang kemudian juga mendorong adanya oknum pegawai instansi pemerintah yang menjadi *rent seeker* dalam proses pengurusan ijin usaha.

Lebih dari 45 persen responden menyatakan bahwa peran oknum pegawai dalam membantu proses pengurusan ijin penting/sangat penting, dan hanya 19,3 persen yang menyatakan tidak penting. Otonomi daerah yang diharapkan bisa membuat kinerja birokrasi perijinan di daerah lebih efektif, justru semakin memberi peluang bagi lahirnya oknum pegawai instansi yang melakukan komersialisasi terhadap proses pengurusan perijinan dengan cara melakukan berbagai pungutan bagi pelaku usaha yang membutuhkan ijin usaha. Dan keberadaan oknum pegawai yang berfungsi sebagai 'calo ijin' merupakan faktor utama yang menyebabkan perbaikan sistem perijinan yang sudah dilakukan beberapa daerah menjadi kurang berfungsi optimal.

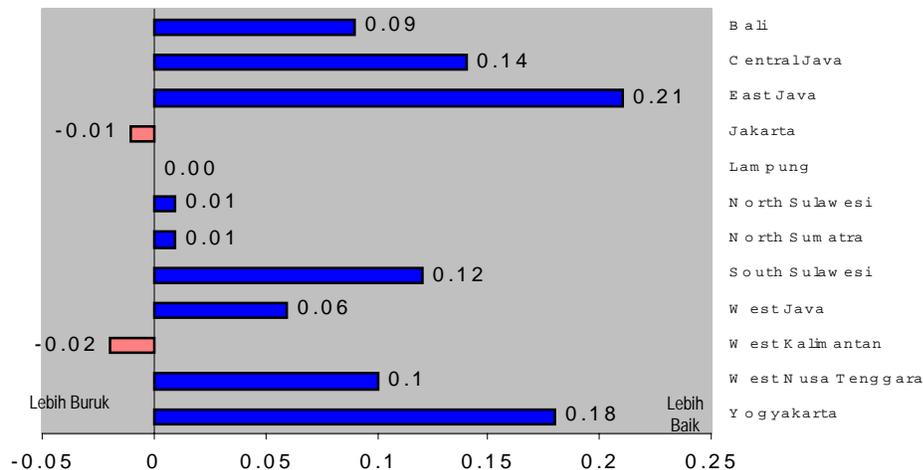
Berdasarkan uraian di atas, bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa secara umum kondisi perijinan usaha sejak pelaksanaan otonomi daerah belum mengalami perbaikan yang signifikan. Realitas tentang kondisi birokrasi perijinan usaha saat ini bisa kita lihat dari dari indeks persepsi pelaku usaha tentang kondisi perijinan pasca otonomi daerah.

Indeks persepsi pelaku usaha tentang birokrasi perijinan usaha diukur berdasarkan persepsi responden terhadap lima faktor yang dikaji dalam birokrasi perijinan usaha (Waktu penyelesaian ijin, transparansi biaya, total biaya perijinan, transparansi prosedur, dan persyaratan). Persepsi setiap responden atas faktor-faktor tersebut saat ini kemudian diskoring sebagai berikut :

Jauh lebih baik	2
Lebih baik	1
Sama saja (tidak ada perubahan)	0
Lebih buruk	-1
Jauh lebih buruk	-2

Dari jawaban setiap responden, kemudian dihitung indeksnya dengan menggunakan metode rata-rata sederhana (*simple average*). Grafik di bawah ini menunjukkan perubahan kondisi perijinan usaha di setiap 12 Propinsi yang menjadi lokasi survei setelah otonomi daerah.

**INDEKS PERSEPSI PELAKU USAHA
TENTANG BIROKRASI PERIJINAN USAHA**



Aspek Pungutan Bagi Pelaku Usaha

Berkaitan dengan aspek pungutan bagi pelaku usaha, maka faktor yang dianalisis terkait dengan pungutan resmi (pajak dan retribusi daerah) dan pungutan liar. Analisis terhadap tersebut meliputi jumlah pungutan, intensitas pungutan, jumlah lembaga/instansi/orang yang melakukan pungutan.

Hasil analisis terhadap aspek pungutan berupa pajak dan retribusi daerah menunjukkan bahwa jumlah nominal pajak atau retribusi daerah yang membebani pengusaha menurut 42

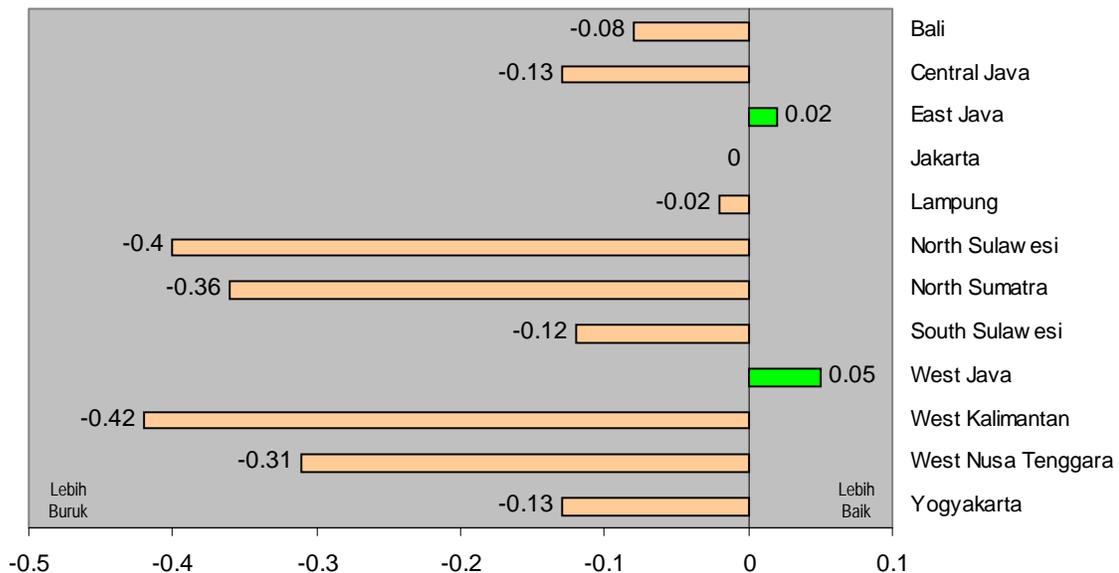
persen responden jumlahnya lebih banyak dan 36,9 persen menyatakan tidak mengalami perubahan. Sedangkan intensitas penarikan pajak dan retribusi daerah serta jumlah lembaga yang memungutnya tidak terlalu banyak berubah.

Untuk melihat persepsi pelaku usaha tentang beban pajak dan retribusi daerah pada saat ini diukur dengan indeks yang dihitung dengan metode yang sama dalam menghitung indeks pada aspek birokrasi perijinan usaha. Ada tiga faktor yang diukur pada aspek beban pajak dan retribusi daerah, yaitu : jumlah nominal pajak dan retribusi daerah, intensitas penarikan dan jumlah instansi/dinas. Skoring untuk ketiga faktor tersebut adalah :

Jauh lebih banyak	2
Lebih banyak	1
Sama saja (tidak ada perubahan)	0
Lebih sedikit	-1
Jauh lebih sedikit	-2

Hasil penghitungan indeks tentang beban pajak dan retribusi daerah di setiap lokasi survei menunjukkan bahwa hampir di semua daerah beban pajak dan retribusi daerah saat ini semakin meningkat, kecuali untuk Jawa Barat dan Jawa Timur.

INDEKS PERSEPSI PELAKU USAHA TENTANG BEBAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



Secara nominal, jumlah pungutan liar yang harus dibayar pengusaha menurut 25,5 persen responden jumlahnya lebih banyak dan 28,3 persen menyatakan jumlah nominal pungutan liar tidak berubah. Sedangkan intensitas dan jumlah pelaku pungutan liar relatif tidak berubah.

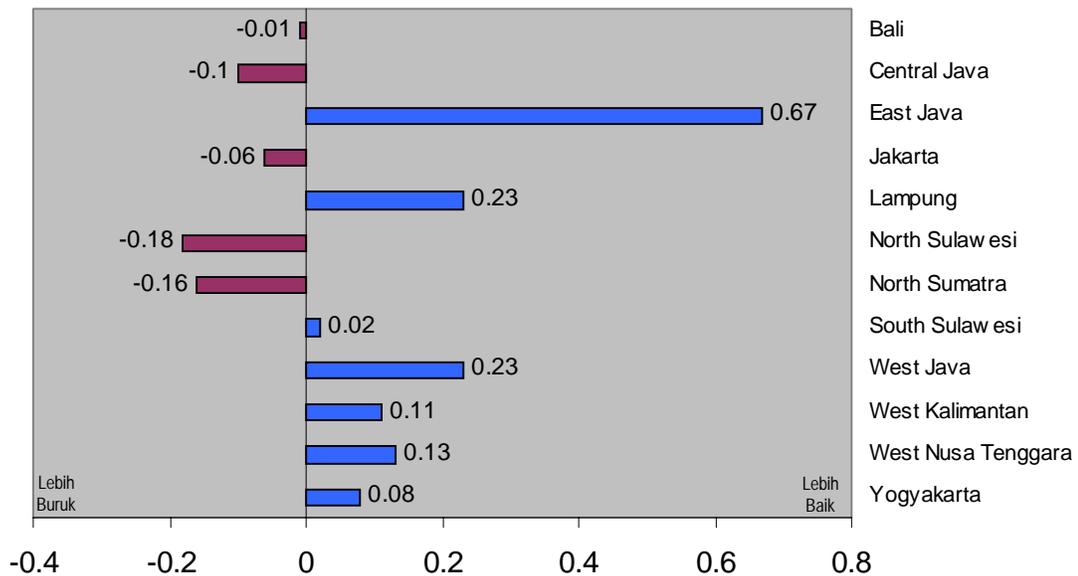
Berdasarkan persepsi pelaku usaha tentang beban pungutan liar pada saat ini, kemudian dapat diperoleh indeks mengenai beban pungutan liar dengan menggunakan metode yang sama dalam menghitung indeks pada aspek birokrasi perijinan usaha. Ada tiga faktor yang

diukur pada aspek beban pungutan liar, yaitu : jumlah nominal pungutan liar, intensitas penarikan dan jumlah instansi/dinas/orang. Skoring untuk ketiga faktor tersebut adalah :

Jauh lebih banyak	2
Lebih banyak	1
Sama saja (tidak ada perubahan)	0
Lebih sedikit	-1
Jauh lebih sedikit	-2

Berdasarkan hasil perhitungan indeks di setiap lokasi survei, menunjukkan bahwa masalah pungutan liar di sebagian besar daerah saat ini sudah lebih baik, kecuali di Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Bali.

INDEKS PERSEPSI PELAKU USAHA TENTANG BEBAN PUNGUTAN LIAR



Meskipun ada kecenderungan jumlah nominal pajak daerah dan retribusi daerah yang harus dibayar pengusaha lebih banyak, tetapi hal tersebut tidak berkorelasi positif dengan pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah. Hal tersebut diungkapkan oleh 57,5% responden yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah saat ini masih buruk, bahkan 12,6% responden menyatakan lebih buruk dibandingkan sebelum otonomi daerah.

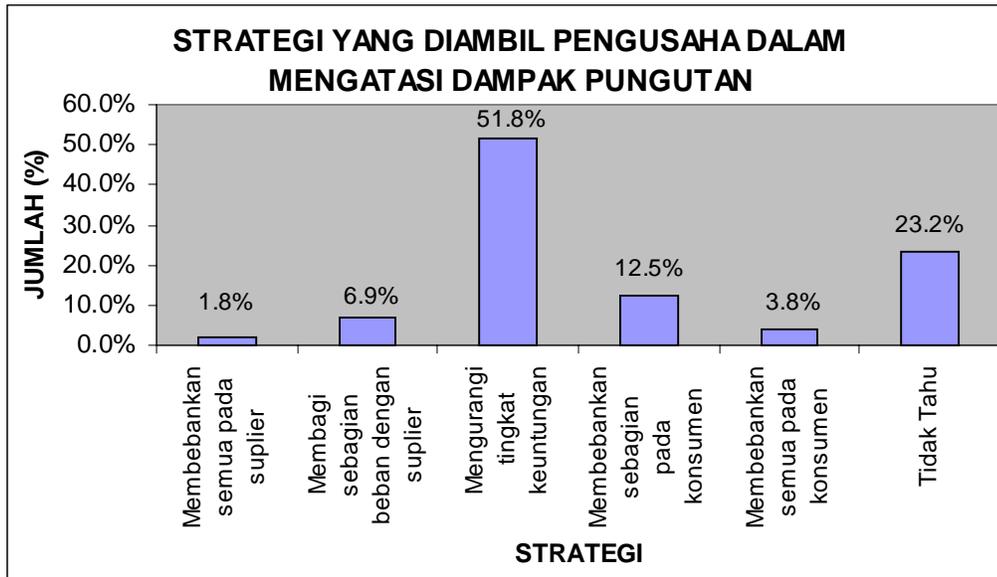
Pelaku pungutan liar setelah otonomi daerah ini makin bervariasi. Berbagai lembaga/kelompok-kelompok dalam masyarakat menjadi pelaku pungutan liar. Pungutan liar yang dialami pengusaha sebagian besar dilakukan oleh aparat desa/kelurahan di sekitar lokasi usahanya. Berdasarkan hasil wawancara pungutan yang dilakukan oleh aparat desa/kelurahan secara nominal jumlahnya tidak terlalu besar. Pungutan liar yang jumlahnya besar dilakukan oleh pihak-pihak yang dianggap berkuasa disekitar lokasi usaha tersebut dan bisa memberikan jaminan keamanan bagi kegiatan usahanya.

PELAKU PUNGUTAN LIAR

PELAKU	% TERHADAP TOTAL RESPONDEN
Oknum aparat desa	27,7
Oknum aparat pemda/kecamatan	24,6
Oknum aparat TNI	9,3
Oknum aparat Polri	16,0
Oknum petugas pelabuhan	2,7
Oknum petugas DLLAJ	6,8
Satgas parpol	5,0
Satgas ormas	8,8
Karang taruna	11,9
Lainnya	23,6

Modus pungutan liar pun bermacam macam di tiap daerah. Misalnya di kota Surabaya, ditemukan adanya oknum pegawai kantor pajak yang meminta laporan keuangan perusahaan diaudit ulang, padahal sebelumnya sudah diaudit pegawai perpajakan. Nah, ketika mengaudit itulah, mereka meminta sejumlah uang tertentu kepada pengusaha. Di kota Medan misalnya, ditemukan oknum Polri yang melakukan pungutan kepada pelaku usaha dengan alasan pelaku usaha menjiplak merk. Kalau pengusaha berupaya melawan dengan tidak mau membayar uang pungutan yang diminta polisi, maka usaha yang dimilikinya terancam ditutup.

Sebagai upaya menjaga kelangsungan usahanya, maka pelaku usaha lebih memilih mengurangi tingkat keuntungan sebagai strategi untuk mengatasi dampak pungutan yang dialaminya. Selain itu, terdapat juga strategi lain yang diambil, misalnya dengan menekan harga pembelian bahan baku dari suplier (membagi beban dengan suplier) dan menaikkan harga jual produk (membagi beban dengan konsumen).

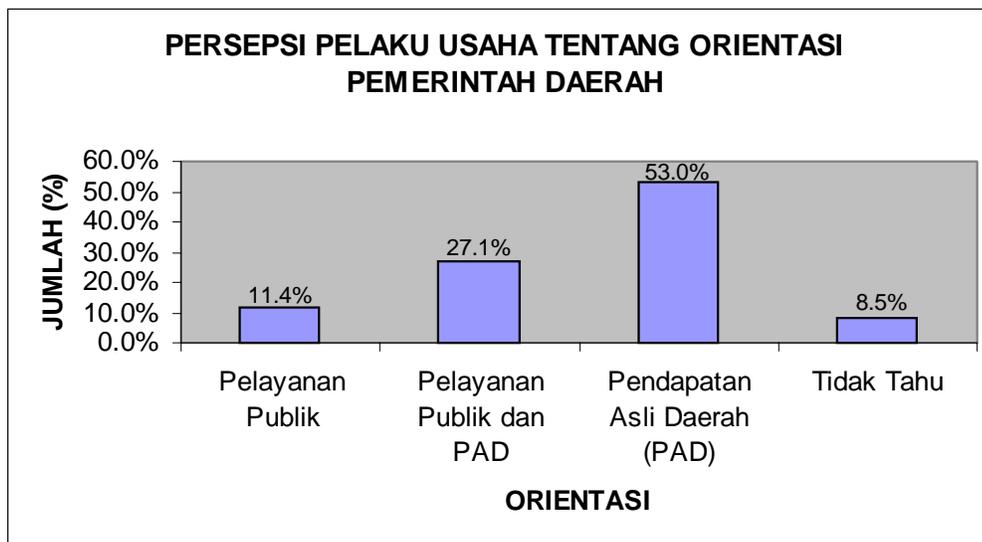


Banyaknya responden yang memilih strategi mengurangi tingkat keuntungan sebenarnya memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian daerah. Strategi pengurangan keuntungan akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan usaha karena alokasi untuk reinvestasi makin berkurang. Pada saat fungsi intermediasi perbankan saat ini yang belum sepenuhnya pulih, maka alokasi laba ditahan sebagai tambahan modal bagi kegiatan usaha sangat penting. Jika kemudian tingkat laba menurun akibat adanya pungutan maka hal tersebut akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap kemampuan akumulasi modal bagi pengembangan usaha.

Aspek Orientasi Dan Arah Kebijakan Pemerintah Daerah

Pada aspek orientasi dan arah kebijakan pemerintah daerah, sebagian besar responden mempunyai persepsi yang negatif terhadap hal tersebut. 53 persen responden menyatakan bahwa saat ini pemerintah daerah lebih berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan berupaya meningkatkan pelayanan publik. Hal ini juga dibuktikan dengan banyak bermunculan Perda di beberapa daerah yang bertujuan untuk menambah pendapatan pemerintah daerah.

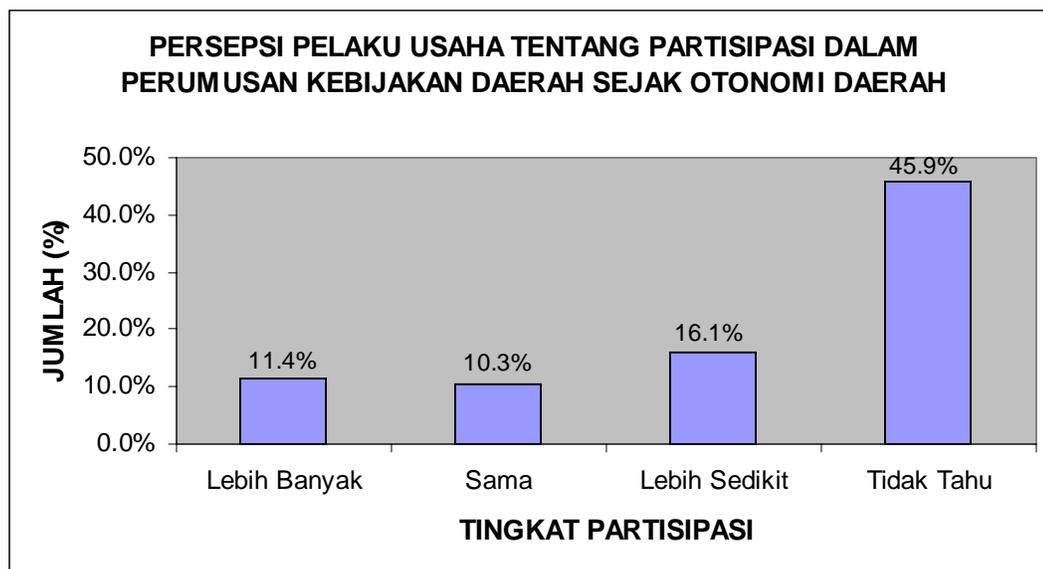
Orientasi pada PAD yang berlebihan menunjukkan pemerintah daerah dan kota kurang kreatif mengelola potensi ekonomi di daerahnya. Karena, justru dengan orientasi PAD yang kemudian diikuti dengan maraknya perda-perda tentang pajak dan retribusi, akan semakin memperburuk iklim usaha di daerah. Selain itu juga bermunculan perda-perda lain yang mempunyai tujuan sama, seperti perda tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga dan perda-perda tentang pelayanan, tetapi lebih ditujukan untuk menggali PAD (seperti : Perda Kota Bandung No. 26/20001 mengenai pelayanan di bidang pertanian).



Ironisnya, berbagai pendapatan yang masuk ke kas daerah, termasuk yang dari PAD, ternyata lebih banyak untuk membiayai birokrasi pemerintah dari pada untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal itu bisa kita lihat dalam komposisi APBD di daerah-daerah yang sebagian besar justru untuk anggaran rutin. Sementara untuk anggaran pembangunan yang sangat penting bagi upaya meningkatkan pelayanan publik dan membangun infrastruktur untuk menambah kondusifitas iklim usaha, serta sebagai stimulus pembangunan ekonomi daerah dialokasikan anggarannya sangat minim.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya anggaran untuk pembangunan adalah karena minimnya partisipasi masyarakat (pengusaha) dalam proses perumusan kebijakan publik, termasuk di dalamnya dalam proses penyusunan anggaran daerah. Berdasarkan hasil survei, tampak bahwa partisipasi pengusaha dalam perumusan kebijakan di daerah juga tidak menunjukkan perubahan yang berarti, hal ini ditunjukkan dengan pendapat lebih dari 45 persen responden yang menyatakan tidak tahu tentang keterlibatannya dalam setiap perumusan kebijakan publik di daerahnya. Bahkan lebih 16 persen responden menyatakan bahwa keterlibatan mereka dalam perumusan kebijakan daerah pada saat ini justru lebih sedikit.

Dari temuan dalam penelitian ini sebenarnya menunjukkan telah terjadi fenomena elitisme dalam proses perumusan kebijakan publik. Elitisme dalam proses penyusunan itu bisa kita lihat dari rendahnya antara lain dari keterlibatan masyarakat pengusaha dalam perumusan kebijakan publik. Proses perumusan kebijakan publik seolah-olah hanya urusan para elit di daerah, baik yang duduk di eksekutif maupun legislatif. Akibat rendahnya partisipasi kalangan dunia usaha terhadap proses perumusan kebijakan publik, maka tak heran kalau kebijakan yang keluar berpotensi merugikan kalangan dunia usaha.



Banyaknya lahir perda tentang retribusi dan pajak merupakan contoh konkret dalam kasus ini. Akibatnya, masyarakat pengusaha banyak menanggung beban baru sebagai konsekuensi langsung dari lahirnya Perda tentang pajak dan retribusi daerah tersebut. Kebijakan publik yang bisa berpengaruh terhadap iklim usaha di daerah jarang atau bahkan tidak pernah menjadi perhatian utama dari kalangan pemerintah daerah dan DPRD.

Hal tersebut yang kemudian membuat mereka kurang mampu merespon faktor-faktor negatif di daerahnya yang bisa mempengaruhi iklim usaha di daerahnya. Berkaitan dengan faktor negatif yang berpengaruh pada lingkungan usaha di daerah, terdapat 852 responden (84 persen) yang mengeluhkan hal tersebut. Beberapa persoalan utama yang menjadi faktor negatif bagi lingkungan usaha di daerah menurut sebagian besar responden adalah : (1) banyaknya pungutan liar, (2) kurangnya infrastruktur dan (3) masalah hambatan non tarif (tata niaga dan diskriminasi).

TABEL
FAKTOR NEGATIF YANG MEMPENGARUHI IKLIM USAHA DI DAERAH

FAKTOR NEGATIF	%
Pungutan Liar	31,0
Pajak dan retribusi	13,0
Kurangnya infrastruktur	24,8
Hambatan non-tarif	20,0
Kurangnya keamanan berusaha	15,5

Berdasarkan pernyataan responden mengenai faktor negatif bagi lingkungan usaha di daerahnya, maka faktor pungutan liar yang paling dominan. Banyaknya keluhan tentang hal ini harus dicermati karena faktor ini berpengaruh langsung pada struktur biaya dalam kegiatan usaha. Dominannya faktor pungutan liar tidak bisa dilepaskan dari persoalannya kurangnya keamanan berusaha akibat ketidakmampuan aparat pemerintah dalam memberikan jaminan keamanan.

Kesimpulan

Selama otonomi daerah belum ada perbaikan yang signifikan terhadap iklim usaha di daerah. Tanggapan para pelaku usaha menunjukkan bahwa kondisi peraturan/kebijakan pemerintah masih menjadi persoalan seperti kondisi sebelum otonomi daerah.

Otonomi daerah hingga saat ini belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan perijinan usaha secara signifikan. Meskipun mulai ada peningkatan dalam hal waktu penyelesaian ijin, transparansi prosedur dan transparansi biaya. Tetapi hal itu menimbulkan konsekuensi biaya perijinan usaha karena pemerintah daerah juga menjadikannya sebagai sumber PAD.

Beban pelaku usaha di daerah semakin berat seiring dengan makin banyaknya beban pajak dan retribusi daerah. Maraknya perda-perda tentang pajak dan retribusi mengindikasikan betapa otonomi daerah diterjemahkan kurang tepat oleh pemerintah daerah. Selain itu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD tidak seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti jaminan keamanan berusaha. Ketidakmampuan

pemerintah tersebut membuat pelaku usaha harus membayar biaya tambahan untuk menjaga kelangsungan usahanya.

Pemerintah lebih banyak meributkan apa yang berhak dikuasai oleh pemerintah daerah. Tetapi sangat jarang kita mendengar pemerintah daerah yang mempersoalkan bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Akibat dari cara berpikir yang demikian mengakibatkan pemerintah daerah lebih berorientasi untuk meningkatkan PAD. Sebaliknya, otonomi daerah yang seharusnya lebih mampu menyerap keinginan dan keluhan masyarakat, justru belum mampu memberikan tempat yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat di daerah.